



Blue Economy as Economic Recovery and Sustainable Development in Indonesia

Ekonomi Biru Sebagai Pemulihan Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

Angelina Munthe^{1*}, Inge Lengga Sari Munthe²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article history: Received: 28-06-2024 Revised: 26-09-2024 Accepted: 30-09-2024 Keywords: Blue Economy; Sustainable Development; Economic Recovery.	Using marine resources sustainably to boost the economy and improve the well-being and health of marine ecosystems is known as the blue economy. With 59% of its coastline in use alone, it is now one of the countries with the longest coastline in the world, Indonesia. Therefore, its marine potential is very much worthy of attention and development. The potential of Indonesia's blue economy is immense to drive economic recovery and growth. Harnessing this potential is especially important at a time when growth in other sectors can no longer meet growing needs. Since the 1972 Stockholm Environment Conference, many countries have been paying attention to the potential of the blue economy to achieve sustainable development. One of Jokowi's goals in implementing Blue Economy is to support the achievement of Maintaining the sustainability of Indonesia's marine ecosystems until 2030 through the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs). In contrast, Joko Widodo combines the ideas of a "Blue Economy" and a "Green Economy". This research aims to find out how the blue economy can be an economic recovery and sustainable development in Indonesia. This research was conducted using the literature study method. The blue economy can improve the welfare of people in small islands and coastal areas and increase employment in Indonesia.
This is an open access article under the CC BY-NC-SA license 	Corresponding Author: Angelina Munthe, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjung Pinang, Indonesia. Email: munteangelina@gmail.com

PENDAHULUAN

Gunter Pauli pertama kali menggunakan konsep "ekonomi biru" dalam bukunya (2010) berjudul "The Blue Economy: 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs". Buku tersebut mengungkapkan tujuan akhir dari model ekonomi biru, yaitu mengubah masyarakat dari kelangkaan menuju kelimpahan dengan apa yang mereka miliki. Konsep ekonomi biru terkait dengan beberapa prinsip utama dari pemikiran Gunter Pauli. Ini terutama mencakup inovasi dan adaptasi, efek ekonomi pengganda, efisiensi sumber daya, pemerataan sosial, kesempatan kerja bagi orang miskin, dan inklusi social (Rendi, 2021). Dunia mempunyai banyak negara pesisir dan kepulauan dengan pendapatan rendah dan menengah ke bawah dimana lautan merupakan wilayah yurisdiksi yang signifikan dan merupakan sumber peluang. Di negara-negara tersebut, inovasi dan pertumbuhan di sektor pesisir, kelautan, dan maritim dapat mencapai tujuan tersebut mengantarkan makanan, energi, transportasi, serta produk dan layanan lainnya (lihat kotak di bawah), dan melayani sebagai landasan pembangunan berkelanjutan. Mendiversifikasi perekonomian negara-negara di luar kegiatan berbasis lahan dan di sepanjang pesisir pantai sangat penting untuk mencapai Pembangunan Berkelanjutan Mencapai tujuan dan mewujudkan pertumbuhan yang cerdas, berkelanjutan, dan inklusif secara global. Di Eropa misalnya, ekonomi biru mewakili sekitar 5,4 juta lapangan kerja dan menghasilkan nilai tambah bruto sebesar hampir €500 miliar per tahun.

Dalam model lama "bisnis seperti biasa", negara-negara mengembangkan ekonomi laut mereka dengan mengeksploitasi sumber daya laut dan maritim mereka. Ini termasuk pelayaran, penangkapan ikan komersial, dan pengembangan sumber daya seperti gas, minyak, dan mineral. Mereka seringkali mengabaikan dampak kegiatan ini terhadap kesehatan dan produktivitas sumber daya yang sama dan ekosistem laut di mana mereka akan berada di masa depan. Teori "ekonomi biru" menawarkan perspektif yang lebih luas yang mencakup pertumbuhan ekonomi, selama pertumbuhan tersebut berlangsung secara berkelanjutan dan tidak berdampak negatif pada sektor ekonomi lainnya. Ekonomi biru, atau "ekonomi hijau", mengutamakan kelestarian lingkungan, keadilan sosial, dan kesejahteraan manusia. Ekonomi biru mencakup peluang ekonomi, tetapi juga melindungi dan mengembangkan sumber daya "biru" yang lebih tidak berwujud, seperti gaya hidup tradisional, penyerapan karbon, dan ketahanan pesisir, untuk membantu negara-negara yang rentan dalam memitigasi dampak buruk kemiskinan dan perubahan iklim. Selain berdampak pada perekonomian nasional, kontribusi kekayaan laut Indonesia menguntungkan perekonomian nasional. Produksi perikanan Indonesia meningkat sebesar 23.186.442 ton pada tahun 2017 dengan harga 384.48 triliun rupiah (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2018; Sari & Muslimah, 2020), menunjukkan potensi ekonomi laut sebesar 1.33 triliun rupiah per tahun.

Pengembangan ekonomi biru di Indonesia berpedoman pada visi "Pesisir dan keberagaman kita sumber daya kelautan dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru berbasis pengetahuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi, menjamin lingkungan laut yang sehat dan memperkuat ketahanan demi kepentingan laut. generasi sekarang dan masa depan." Visi ini akan diwujudkan melalui implementasi empat hal misi, yaitu; (1) mendorong pertumbuhan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; (2) mengamankan lautan yang sehat, tangguh, dan produktif; (3) meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, dan kesejahteraan manusia kemakmuran; dan (4) menciptakan lingkungan yang mendukung. Indonesia memiliki banyak potensi laut karena menjadi negara kepulauan. Meskipun pemerintah telah mulai memanfaatkan potensi ini sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional, mereka belum merencanakan atau memfasilitasi pembangunan ekonomi biru di lautan. Untuk mencapai hal ini, Pemangku kepentingan harus mendapatkan pengetahuan manajemen dan sumber daya manusia untuk menjadi inovatif, dan mereka harus berusaha mendapatkan investor untuk modal pembangunan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi laut, pemerintah telah membuat rencana bisnis dan manajemen yang

sistematis. Ekologi, energi, efisiensi, efektivitas, dan ekonomis adalah hal-hal yang harus dipertimbangkan, menurut Ervianto (2018). Perencanaan ini harus sederhana untuk digunakan. Selain itu, berbagai media memainkan peran penting dalam mengubah cara masyarakat bertindak dan berpikir tentang pembangunan ekonomi. Menurut Sinulingga dan Trisni (2018), lokasi geografis dan astronomis Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan antara 6°LU dan 11°LS dan 95°BT dan 141°BT. Lokasi ini akan berdampak pada iklim dan ekonomi Indonesia baik di darat maupun di laut. Dengan perairan seluas 6,4 juta kilometer persegi, atau 77 persen dari wilayahnya, Kepulauan Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia. Luasnya air di Indonesia memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara. Itu pasti tidak terjadi terlepas dari berbagai bahaya yang mengancam perairan, seperti pencemaran, perubahan iklim, kerusakan ekosistem, dan tindakan manusia (Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, 2022).

Sektor ekonomi biru adalah bagian penting dari pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19, menurut Safri Burhanuddin, Kepala Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ini karena sektor ini memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian Indonesia. Studi ini memberikan saran kebijakan yang dapat diterapkan dalam dua rentang waktu. Tujuan pertama adalah agar rekomendasi dapat diterapkan hingga tahun 2024, atau selama sisa masa jabatan pemerintahan saat ini. Perikanan tangkap dan wisata bahari, dua industri utama, dapat membantu pemerintah memfokuskan sumber daya yang tersisa pada mereka dengan melakukan pemetaan sektor prioritas. Namun, pemerintah juga dapat menetapkan undang-undang yang berfokus pada lembaga ekonomi biru untuk menciptakan fondasi untuk kemajuan ekonomi biru di masa depan. Dengan kata lain, dalam proyeksi jangka panjang, undang-undang ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi biru hingga tahun 2045. Dalam proyeksi ini, pertumbuhan ekonomi biru seharusnya berada di titik yang ideal antara pertumbuhan ekonomi dan keberlangsungan ekologi.

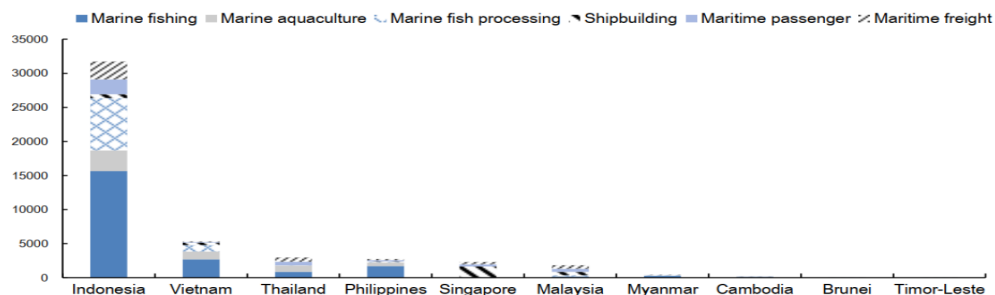
METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan untuk pengumpulan data. Metode studi kepustakaan ini melibatkan penulis melakukan pencarian dan mengumpulkan berbagai informasi dan keterangan dari berbagai media kepustakaan. Penulisan ini dapat didukung oleh buku, jurnal, prosedur, artikel, atau berita online dari berbagai media. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data tentang ekonomi biru, khususnya tentang pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Berbagai data sebelumnya digunakan sebagai data sekunder untuk mencapai tujuan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak Deklarasi Djuanda pada tahun 1957, status Indonesia sebagai negara kepulauan telah diperkuat dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Indonesia memiliki sekitar 17.500 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km. Luas daratan Indonesia sebesar 1,91 juta km², sedangkan luas perairan 6,32 juta km². Ini menunjukkan bahwa sekitar 62% dari wilayah Indonesia adalah laut dan perairan (Indonesiabaik.id). Ekonomi kelautan Indonesia berbeda dari negara lain di Asia Timur Pasifik dan ASEAN. Perikanan tangkap, akuakultur, dan pengolahan merupakan bagian terbesar dari ekonomi kelautan Indonesia. 83% dari nilai tambah yang dihasilkan dari penangkapan ikan, budidaya perairan, dan pengolahan ikan berasal dari enam industri berbasis kelautan yang diukur: perikanan tangkap laut, perikanan budidaya, perikanan pengolahan, pembuatan kapal,

angkutan penumpang laut, dan angkutan laut. Pada tahun 2015, Indonesia menyumbang 84% dari nilai tambah pengolahan ikan laut di negara-negara ASEAN, dan 54 persen dari nilai tambah penangkapan ikan laut (Sambodo, 2023).



Sumber : Indonesia Blue Economy Roadmap

Ekonomi biru, juga disebut sebagai "ekonomi biru", adalah gagasan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem laut dan memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan memanfaatkan potensi ekonomi yang ada di bidang perikanan dan kelautan. Ekonomi biru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dan pesisir serta menambah lapangan pekerjaan. Konsep ini menggambarkan cara memanfaatkan sumber daya laut dengan mengimbangi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas harus membangun ekonomi biru yang berkelanjutan dan bertanggung jawab karena potensi sumber daya laut yang sangat besar dan beragam serta perannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Salah satu tujuan dari sosialisasi Blue Economy kepada masyarakat pesisir pantai adalah untuk memberi mereka pemahaman yang lebih baik tentang ide ini sehingga mereka dapat mempertimbangkan bagaimana meminimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan dan kemudian dapat mengambil sumber daya alam laut dengan cara yang lebih seimbang dan efisien. Konsep ekonomi biru mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya alam berfokus pada meningkatkan sistem siklus produksi, meminimalkan pembuangan limbah, kepedulian sosial, inovasi, adaptasi, dan tata kelola yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih besar di masa depan (Prayuda et al., 2019).

Dalam peta jalan ekonomi biru yang dirilis Bappenas, tujuan adalah untuk meningkatkan lingkungan maritim yang terjaga secara keseluruhan menjadi 30%, atau sekitar 97,5 juta hektar area perairan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor maritim menjadi 15%, dan meningkatkan kontribusi lapangan kerja menjadi 12% dari total pekerja di Indonesia pada tahun 2045. Menurut Laporan Laut untuk Kesejahteraan: "Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia", yang dirilis Bank Dunia, laut memainkan peran penting dalam kesejahteraan Indonesia, karena memiliki sektor perikanan senilai US\$27 miliar, mempekerjakan 7 juta orang, dan memenuhi lebih dari 50% kebutuhan protein hewani negara. Keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tujuan dari UUD 1945. Selain itu, diharapkan bahwa pelaksanaan ekonomi biru akan menguntungkan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, di mana sekitar 12,48% populasi hidup dalam tingkat kemiskinan ekstrem, menurut data BPS. Beberapa undang-undang, seperti UU Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, membantu meningkatkan kehidupan orang-orang di pesisir, terutama mereka yang hidup sebagai nelayan dan petambak garam.

Segala upaya dilakukan untuk meningkatkan kemampuan nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam dalam mengelola pergaraman atau bisnis perikanan. Tujuan dari Perlindungan dan Pemberdayaan adalah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memungkinkan usaha yang berkelanjutan, meningkatkan kemampuan dan kapasitas, menguatkan kelembagaan, mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan, menumbuhkan sistem dan kelembagaan pembiayaan usaha, dan melindungi usaha dari bencana alam, bencana alam, dan perubahan iklim sambil memberikan keamanan, keselamatan, dan dukungan hukum.

Kebijakan fiskal dapat mendorong perekonomian melalui belanja negara langsung dengan nominal yang jelas, insentif perpajakan non tunai yang digunakan melalui belanja perpajakan, dan insentif perpajakan lainnya yang tidak dimasukkan dalam belanja perpajakan. Sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2020, insentif fiskal diberikan untuk impor dan pengiriman barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan dibebaskan dari pajak pertambahan nilai dalam rangka pengelolaan sektor ekonomi biru. Barang hasil kelautan dan perikanan strategis, baik penangkapan maupun budidaya, dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai saat diimpor atau diserahkan, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK. 010/2020, peraturan lain 53 yang mengatur insentif fiskal. Karena konsumsi ikan dan garam adalah kebutuhan pokok yang sangat tinggi bagi populasi yang besar, berkaitan dengan kebutuhan hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, dan merupakan bagian penting dari kesejahteraan masyarakat, peraturan ini menetapkan bahwa barang-barang ini tidak dikenai PPN.

Kontribusi sosial dan ekonomi sektor perikanan dapat ditingkatkan melalui pengembangan sistem pengambilan keputusan, pengendalian panen, dan ilmu pengetahuan dan data. Sebagai bagian dari pengembangan pariwisata, melakukan upaya untuk melindungi ekosistem laut dan pesisir akan memastikan pertumbuhan wisatawan yang berkelanjutan dan mempertahankan reputasi "brand Indonesia" Indonesia sebagai destinasi wisata favorit. Pertama dan terpenting, reformasi ini memiliki dampak lintas sektor dan mencakup sektor lain. Perikanan yang menguntungkan, perlindungan masyarakat pesisir secara fisik, dan pertumbuhan pariwisata semuanya didukung oleh kegiatan konservasi yang melindungi terumbu karang. Selain itu, mengurangi kemungkinan sampah di laut dapat menghemat uang bagi sektor perikanan, pariwisata, kesehatan masyarakat, dan logistik. Sektor kelautan bergantung satu sama lain, jadi keputusan tentang investasi dan perencanaan lintas sektor untuk mencapai tujuan yang berbeda akan sangat penting.

Untuk membiayai investasi yang dibutuhkan, ada banyak peluang. Sebagai contoh, manfaat pariwisata terumbu karang, yang dihitung dari biaya pengunjung, dapat membiayai kegiatan konservasi. Pemerintah Indonesia harus terus melakukan kemajuan dalam pengumpulan data dan aksesibilitas publik. Strategi ekonomi biru berfokus pada ketergantungan, yang mengatur pertumbuhan industri kelautan melalui upaya lintas sektor. Potensi Indonesia untuk menjadi pemimpin dunia ditunjukkan oleh rencana tata ruang laut. Alat kebijakan integrasi tambahan, Rencana Induk Pariwisata Terpadu Indonesia, sangat penting untuk hasil sektor kelautan (Kementerian PUPR, 2020). Ada kemungkinan bahwa pengembangan instrumen ini akan memungkinkan integrasi kegiatan tambahan ke dalam kerangka kebijakan dan strategis yang sudah ada. Ini termasuk energi lepas pantai, bioprospecting, dan desalinasi, beberapa industri yang belum dikembangkan di Indonesia tetapi dapat berdampak pada masa depan laut negara.

Sektor perikanan menghadapi biaya yang cukup besar karena sampah plastik di laut. Menurut estimasi yang diterbitkan, sampah plastik mengakibatkan kerugian pendapatan global sebesar USD

2,2 miliar per tahun sebagai akibat dari hasil tangkapan yang berkurang dan terkontaminasi, waktu yang hilang, dan kerusakan alat tangkap ikan. Kerugian domestik di Indonesia diperkirakan mencapai USD 147 juta setiap tahun, berdasarkan perkiraan dari penelitian di tempat lain. Salah satu bagian yang paling banyak berdampak pada kerugian tersebut adalah alat tangkap ikan yang ditinggalkan, hilang, atau dibuang (ALDFG). Efek ALDF jangka panjang karena ghost gear atau alat tangkap yang ditinggalkan dapat menjarat ikan selama beberapa tahun setelah ditinggalkan atau dibuang ke laut, mengurangi hasil tangkapan dan merusak ekosistem. Indonesia menghasilkan 0,55 juta ton sampah laut setiap tahun. Untuk menghindari biaya seperti ini dan lainnya, ada alasan yang kuat secara ekonomi untuk berinvestasi dalam pengelolaan sampah. Biaya ekonomi untuk setiap ton sampah rumah tangga campuran yang dibakar di halaman belakang atau dibuang di perairan mencapai sekitar USD 375, berdasarkan perkiraan yang dibuat untuk lima negara: Tiongkok, Indonesia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Sebaliknya, Bank Dunia memperkirakan biaya yang cukup untuk pengumpulan (cakupan penuh) dan pengolahan atau pembuangan sampah di negara berpenghasilan tertinggi untuk menghilangkan pembuangan sampah air. Biaya yang diproyeksikan untuk mitigasi sampah laut lebih kecil daripada kerugian ini. Namun, masalah sampah tidak dapat diselesaikan hanya dengan infrastruktur. Ekonomi sirkular, yang berfokus pada pengurangan sampah, akan sangat penting untuk ekonomi hijau Indonesia dalam jangka panjang. Ini mencakup menaikkan harga plastik, memberikan insentif untuk inovasi dan daur ulang, dan mengubah cara orang bertindak untuk mengurangi penggunaan plastik. Standar untuk bahan daur ulang, persyaratan kandungan daur ulang minimum, dan prioritas bahan daur ulang dalam pengadaan publik dapat dimasukkan ke dalam peraturan pemerintah yang memperluas tanggung jawab produsen (Bank Dunia, 2021).

Sebagai anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC), Indonesia harus menerapkan kesepakatan ini di dalam negerinya. Negara-negara anggota Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) telah setuju untuk menggunakan ekonomi biru sebagai alat untuk membangun negara-negara anggotanya. Indonesia menjadi anggota amanat ini, dan pada tahun 2012, Dewan Kelautan Nasional, yang bernaung pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, mengembangkan konsep digital yang disebut "Kebijakan Ekonomi Kelautan dengan Model Ekonomi Biru". Food Agriculture Organization (FAO) mendefinisikan ekonomi biru sebagai gagasan yang menekankan pada perlindungan dan manajemen yang berkelanjutan. Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) mendefinisikan ekonomi biru sebagai model ekonomi yang mendorong pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable), yang mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan dengan fokus pada pertumbuhan, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Pembangunan ekonomi kelautan memerlukan perencanaan yang menyeluruh dan berpihak terhadap lingkungan dan masyarakat untuk berhasil. Pembangunan harus didasarkan pada keterpaduan geografis, ekologis, pemangku kepentingan, sektor, dan ilmu pengetahuan. Mengingat perekonomian kelautan terdiri dari berbagai sektor, diperlukan kebijakan yang sinergis untuk sektor ini. Hal ini karena aktivitas ekonomi, baik di dalam maupun di luar sektor, sangat berperan dalam keberhasilan pembangunan ekonomi kelautan (Yundari Chandra et al, 2021). Oleh karena itu, jika model ekonomi biru diterapkan secara bersamaan dalam perencanaan pembangunan Indonesia, hal itu akan berdampak positif pada lingkungan dan kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Paradigma masyarakat menjadi lebih peduli pada lingkungan, memperhatikan sumber daya hayati, dan berusaha menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, kebijakan blue economy ini dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena penerapan model blue economy memiliki dampak besar pada pertumbuhan bisnis yang bergantung pada kekayaan laut dan lingkungan. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi biru sebagai model untuk pembangunan kelautan nasional, diharapkan dapat mengatasi hubungan antara ekonomi dan ekosistem serta dampak negatif dari aktivitas ekonomi seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Konsep ekonomi biru mendorong industrialisasi sektor kelautan dengan tujuan meningkatkan nilai tambah, meningkatkan persaingan, modernisasi sistem produksi hulu dan hilir, dan memperkuat perusahaan yang bergantung pada komoditas utama. Selain itu, keberhasilan ekonomi biru membutuhkan tenaga kerja dan teknologi yang memadai, serta peningkatan rantai hulu ke hilir. Menurut pendekatan ekonomi biru, diharapkan bahwa pembangunan ekonomi laut dapat menjadi motor pembangunan nasional dan sumber pertumbuhan baru.

Diharapkan bahwa perekonomian kelautan dapat menghasilkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kesehatan lingkungan melalui perekonomian rendah karbon (low carbon economy). Model ini terdiri dari empat pilar: 1) penggabungan pembangunan daratan dan kelautan, 2) pembangunan yang menggabungkan pembangunan lautan dan daratan, dan 3) pembangunan yang menggabungkan kemajuan di darat dan di lautan. Industri perikanan nasional saat ini sangat tertinggal dibandingkan dengan sektor perikanan yang sebanding di negara lain di Asia Pasifik. Ini masih disebabkan oleh industri pengolahan ikan. Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, yang secara umum didefinisikan sebagai "pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat", telah ditetapkan sebagai dasar untuk kebijakan pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan melalui penerapan model ekonomi biru, yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang lebih optimal melalui modernisasi sistem produksi tanpa limbah, dan penggunaan sumber daya yang lebih banyak daripada yang sebelumnya.

SIMPULAN

Ekonomi biru dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pulau-pulau kecil dan pesisir serta menambah lapangan pekerjaan. Konsep ini mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut dengan mempertimbangkan faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks global, ekonomi biru menjadi semakin penting karena potensinya yang besar dan beragam serta peranannya dalam menjaga keseimbangan ekosistem global. Negara-negara yang memiliki wilayah laut yang luas harus membangun ekonomi biru yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, diharapkan bahwa pelaksanaan ekonomi biru akan menguntungkan masyarakat, terutama masyarakat pesisir, di mana sekitar 12,48% populasi hidup dalam tingkat kemiskinan ekstrem, menurut data BPS. Oleh karena itu, jika model ekonomi biru diterapkan secara bersamaan dalam perencanaan pembangunan Indonesia, hal itu akan berdampak positif pada lingkungan dan kelestarian sumber daya perikanan dan kelautan. Paradigma masyarakat menjadi lebih peduli pada lingkungan, memperhatikan sumber daya hayati, dan berusaha menjaga kelestariannya. Oleh karena itu, kebijakan blue economy ini dapat membantu mewujudkan tujuan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena penerapan model blue economy memiliki dampak besar pada pertumbuhan bisnis yang bergantung pada kekayaan laut dan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sambodo dkk. 2023. Indonesia Blue Economy Roadmap. Ministry of National Development Planning/National Development Planning Agency (BAPPENAS). Jakarta.
- Keliat, Makmur dkk. 2022. Prospek Ekonomi Biru bagi Pemulihan Ekonomi Indonesia. LAB 45 Monograf. Jakarta:Laboratorium Indonesia 2045
- Rendi, Humas UMRAH. 2021. Usung Ekonomi Biru FE UMRAH Hadirkan Gunter Pauli Pada MEBIC 2021. Diakses pada 04 Mei 2024, dari <https://umrah.ac.id/archives/8068>.
- World Bank Group. 2016. Blue Economy Development Framework. Diakses pada 04 Mei 2024, dari https://thedocs.worldbank.org/en/doc/4464414733490790680010022016/original/AMCOE_CCBBlueEconomyDevelopmentFramework.pdf
- Nansi, MR, Natalia, SAYA & Rohman, NR (2024). Pemulihan Ekonomi Biru Indonesia Pasca Pandemi. *Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, 4(2). 6992-7001. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i2.5549>
- Indonesiabaik. 2018.Indonesia Kaya Potensi Kelautan dan Perikanan.Indonesiabaik.Id. https://indonesiabaik.id/infografis/infografis-indonesia-kaya-potensi_kelautan-dan-perikanan
- Bank Dunia.2021.Laut Untuk Kesejahteraan:Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia.Bank Dunia, Washington, D.C
- Rani, F.& Cahyasari, W.2015.Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo. *Jurnal Transnasional*, 7(1),1914-1928. <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/view/3189>
- Chandra, Y dkk.2021.Implementasi Kebijakan Berbasis Blue Economy dalam Kerangka Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan FAO: Studi Mengenai Unit Pengolahan Ikan di Kabupaten Lombok Utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*. Vol 3 Ed 1.
- Wahyuddin, Y.A dkk. 2022.Sriwijaya Journal Internasional Relations. Vol 2 No 2.